PENGARUH PAJAK, RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDA ACEH

THE EFFECT ANALYSIS OF TAXES, RETRIBUTION AND OTHER LEGITIMATE LOCAL REVENUE FOR THE ECONOMIC GROWTH OF BANDA ACEH MUNICIPALITY

Cut Risya Varlitya
Staf Pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unsyiah, Banda Aceh
e-mail: cutrisyavarlitya@unsyiah.ac.id
Diterima: 12 Maret 2017; direvisi: 10 Mei 2017; diterbitkan: 1 Juni 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak (PD), retribusi daerah (RD), dan lain-lain PAD yang sah (LPADS) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaruh PD, RD, dan LPADS terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto) di Kota Banda Aceh. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode deskriptif dan metode kuantitatif serta model fungsi regresi linier berganda yang telah dimodifikasi atau dikembangkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtun waktu (time series) dari periode 1998 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi PD mendominasi penerimaan PAD selama periode 1998 sampai dengan 2015 dimana kontribusi rata-ratanya pertahun adalah sebesar 49,47 persen, RD sebesar 25,50 persen, dan kontribusi terkecil ada pada LPADS sebesar18,33 persen. Hasil estimasi menunjukkan koefisien regresi RD dan LPADS bertanda positif artinya setiap kenaikan 1 persen RD dan LPADS mendorong pertumbuhan ekonomi naik lebih cepat sebesar 2,29 dan 3,71 persen, sedangkan koefisien PD bertanda negatif berarti bahwa setiap peningkatan PD maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,27 persen. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dan tidak signifikan secara parsial antara variabel PD dan RD terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun variabel LPADS berpengaruh secara signifikan baik simultan maupun parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of local tax (PD), local retribution (RD), and other legitimate PAD (LPADS) to Local Revenue (PAD) and the effect of PD, RD and LPADS on Economic Growth (Gross Domestic Regional Product) in Banda Aceh. The hypothesis was tested using descriptive method and quantitative method and multiple linear regression function model which has been modified or developed. The data used in this study is secondary data in the form of time series data (time series) from 1998 to 2015. The results showed that PD contribution dominated PAD revenue during the period of 1998 up to 2015 where the average contribution per year is 49.47 percent, RD of 25.50 percent, and the smallest contribution is in LPADS of 18.33 percent. The estimation results show that RD and LPADS regression coefficients are positive signified that each increase of 1 percent of RD and LPADS encourages economic growth to rise faster by 2.29 and 3.71 percent, whereas the coefficient of PD is negative, meaning that any increase in PD will cause a decrease in the economic growth of 2.27 percent. There is a significant influence simultaneously and not significant partially between the

variables of PD and RD on the economic growth of Banda Aceh. However, LPADS variables significantly influence both simultaneous and partial to economic growth in Banda Aceh.

***Keywords**: Local Tax, Local Retribution, Other Legitimate PAD, Local Revenue (PAD), and Economic Growth (GDRP).*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan merata serta meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Oleh sebab itu, pembangunan merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi setiap negara, tanpa pembangunan suatu negara tidak akan mengalami kemajuan.

Pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional, yang kondisi awalnya lebih kurang statis dalam jangka waktu yang cukup lama, untuk upaya menghasilkan dan mempertahankan kenaikan tahunan Produk Domestik Bruto (Todaro, 1995:88). Pembangunan nasional yang dilaksanakan tentunya harus mampu diaplikasikan lagi kedalam pembangunan daerah.

Produk Regional Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk digunakan didalam mengukur kondisi ekonomi disuatu daerah pada suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan yang akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik secara menyeluruh maupun sektor demi sektor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, 2013)

Tingkat keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung kepada sistem hubungan antara pusat dan daerah. Pada Masa pemerintahan orde baru mengembangkan suatu sistem pemerintahan tersentral, dimana pemerintah pusat memegang kendali penuh terhadap pemerintah daerah. Ruang yang diberikan bagi aparat didaerah untuk mengurus kepentingan daerahnya sangat sempit, bahkan kerap kali potensi yang ada didaerah tersentral kepusat, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi pusat terhadap daerah tanpa mempertimbangkan kemajuan dan perkembangan daerah itu sendiri. Akibatnya terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah, baik dari segi pembangunan, akses informasi dan terutama kemakmuran masyarakatnya. Akibatnya muncul tuntutan reformasi disegala bidang, salah satu unsur reformasi total tersebut adalah tuntutan otonomi yang luas kepada daerah (pemerintah daerah), yang dikenal dengan kebijakan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh

karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan tentunya juga memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Banda Aceh sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 179 ayat 2 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada pasal 180 ayat 1 sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal;
d. Zakat;
e. Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 yang disebut Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya jenis pajak yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a) Pajak Kendaraan Bermotor; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d) Pajak Air Permukaan; dan e) Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan; dan k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang adalah retribusi daerah, bahkan dibeberapa daerah pendapatan retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. Oleh karena itu menurut Suparmoko (2001: 85) pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah terdiri atas tiga jenis yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Untuk sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat 5 adalah:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
b. Jasa giro;
c. Pendapatan bunga;
d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
h. Pendapatan denda pajak;
i. Pendapatan denda retribusi;
j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
k. Pendapatan dari pengembalian;
l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
n. Pendapatan dari BLUD.

Adapun perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Asli daerah Kota Banda Aceh Berdasarkan Masing-Masing Sumber PAD dari tahun 1998-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pajak, Retribusi dan Lain-lain PAD yang sah Kota Banda Aceh selama Tahun 1998 s/d 2015 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
1998	1.898.447.131	1.616.925.536	39.317.009
1999	2.206.639.470	1.340.388.052	35.088.019
2000	1.268.108.173	984.474.622	42.214.690
2001	3.529.598.846	1.719.749.370	226.873.746
2002	3.732.909.688	2.395.382.755	116.594.244
2003	3.027.586.900	2.591.007.142	407.439.463
2004	5.110.059.228	3.220.360.050	1.001.780.656
2005	15.812.025.530	6.930.661.811	7.346.688.044

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah
2006	10.830.287.616	1.659.864.500	3.906.774.700
2007	15.812.025.530	6.930.661.811	5.513.320.044
2008	25.518.334.146	8.644.628.092	4.328.653.203
2009	27.468.807.297	11.400.912.918	5.342.944.054
2010	22.054.470.154	12.146.341.942	3.081.466.508
2011	33.550.309.961	14.797.336.701	27.726.461.217
2012	38.662.932.308	14.652.334.236	33.726.359.101
2013	46.726.398.187	17.893.186.595	49.358.032.125
2014	51.801.124.535	17.513.331.930	86.919.972.924
2015	51.534.672.190	19.494.630.782	115.814.569.008

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (diolah)

Tabel diatas menunjukan perbandingan penerimaan masing-masing sumber PAD, dan yang memberikan penerimaan yang terbesar untuk PAD adalah pajak daerah dengan total pendapatan sebesar Rp360.544.736.890 dan yang memberikan penerimaan terendah adalah Retribusi daerah dengan total pendapatan sebesar Rp145.932.178.845 yang disebabkan oleh belum maksimalnya pungutan yang bersumber dari retribusi daerah.

Menurut Rizka, Islahuddin, & Nadirsyah (2014: 69-79) dalam mengantisipasi desentralisasi fiskal dan proses otonomi daerah, sepertinya pajak dan retribusi daerah belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Berdasarkan Laporan Akhir – Assesment Pendapatan Asli daerah Kota Banda Aceh, Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, diantaranya: 1). Pemerintah Kota Banda Aceh masih mengalami ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat meskipun adanya kecenderungan peningkatan PAD dalam beberapa tahun terakhir. 2). Kota Banda Aceh belum sepenuhnya mampu menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sekaligus dianggap belum mencapai kemandirian daerah. 3). Belum maksimalnya pemetaan dan belum optimalnya penggalian potensi sumber daya ekonomi dan potensi objek-objek PAD sebagai sektor unggulan untuk menjadi kekuatan dan daya saing daerah (core competence).

Realisasi pajak daerah terhadap PAD pada Kota Banda Aceh setiap tahun mengalami peningkatan yang fluktuatif yang terendah terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar Rp1.268.108.173, dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp51.801.124.535, hal ini disebabkan oleh tunggakan pajak di Kota Banda Aceh semakin meningkat. Dari laporan BPK R.I terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota (LKPK) Banda Aceh per 31 Sep, terungkap bahwa tunggakan pajak daerah tahun 2010 mencapai Rp443.862.684. Padahal jika ditambahkan dengan piutang pajak daerah maka PAD Banda Aceh akan melewati target dan akan menambah kontribusi Pajak daerah terhadap PAD.

Perkembangan realisasi retribusi daerah dari tahun 1998 s/d 2015 mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan dimana jumlah retribusi daerah beberapa tahun ini tidak memenuhi target. Pada tahun 2015 retribusi daerah hanya mencapai Rp19.494.630.782 sedangkan target yang harus dicapai Rp24.310.299.646, Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan PAD. Padahal penerimaan dari retribusi jika di optimalkan dan berkelanjutan pungutannya dapat sangat

potensial untuk peningkatan PAD dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah.

Dengan melihat hal tersebut, maka seharusnya daerah hendaknya dapat meningkatkan kontribusi sumber-sumber PAD (pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Zakat) terhadap PAD, dengan menggali sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan. Dalam upaya mewujudkan PAD yang benar-benar bermanfaat bagi daerah, maka diperlukan upaya yang maksimal dari aparatur daerah dan semua elemen masyarakat agar proses penerimaan dan penggunaan PAD dapat berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kedudukan kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh memiliki keuntungan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan apabila mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ketahun, ini berarti Kota Banda Aceh mengalami peningkatan atau keberhasilan didalam pembangunan ekonomi.

Supranto (1997: 8) mengatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator pertumbuhan Ekonomi, sebenarnya merupakan penjumlahan nilai tambah (Value Added) dari seluruh produksi selama satu tahun yang dinyatakan dalam nilai rupiah.

Adapun perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh seperti terlihat dalam Grafik 1 berikut ini:

Grafik 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Banda Aceh MenurutLapangan Usaha ADHK 1998 Tahun 1998 s/d 2015

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (diolah)

Dari Grafik 1 diketahui bahwa PDRB Kota Banda Aceh menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan (ADHK) dari tahun 1998 s/d 2015 relatif fluktuatif, pada tahun 1998 besarnya PDRB mencapai Rp452.524.900.000 dan pada tahun 1999 meningkat menjadi Rp456.984.100.000 sebesar 0,09 persen. Pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh mengalami penurunan pada tahun 2005 sebesar 0,15 persen, hal ini dikarenakan bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2006 pertumbuhan

perekonomian Aceh melesat tajam yaitu sebesar 44,62 persen hal ini dikarenakan banyaknya bantuan negara asing diberbagai sektor untuk merekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana gempa dan tsunami. Setelah itu pertumbuhan ekonomi Aceh terus mengalami penurunan hingga tahun 2011 hanya mencapai 4,40 persen, namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 241,69 persen, hal ini diakibatkan oleh penambahan jumlah sektor ekonomi dari sembilan menjadi tujuh belas sektor.

Nilai PDRB ADHK Kota Banda Aceh selama 4 tahun terakhir juga mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp551,76 milyar per tahun. Kondisi ekonomi kota Banda Aceh masih terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bila mengacu pada PDRB tahun dasar 2010, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh selama 4 tahun terakhir adalah sebesar 5,25 persen. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh mencapai 5,01 persen yang menunjukan akselerasi lebih baik dari tahun 2014 yaitu sebesar 4,50 persen (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh, 2015)

Besarnya kewenangan yang dimiliki daerah dalam membuat pemerintah daerah semakin kreatif dalam merancang berbagai Peraturan Daerah/Perda (Aceh: Qanun) guna mengutip dari objek-objek pajak daerah/retribusi yang dijadikan sasaran. Dengan alasan yang mengedepankan demi peningkatan PAD. Adanya beragam pungutan/kutipan yang dilegalkan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh daerah berimplikasi pada terjadinya ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang membuat iklim investasi dan dunia usaha di daerah tidak kondusif khususnya bagi para investor yang ingin berkiprah membangun daerah. Boleh jadi, karena hal ini pula menyebabkan ada investor yang mengurungkan niatnya untuk berekspansi usaha, bahkan juga ada yang membatalkan niatnya berinvestasi diberbagai sektor PDRB. Hal ini juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun menurut Walikota Banda Aceh Ibu Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE dalam Serambi Indonesia (2015), PDRB kota Banda Aceh meningkat secara stabil, oleh karena membaiknya kondisi perekonomian juga ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah dari 5.861 ditahun 2012 menjadi 5.933 ditahun 2013. Dan angka tersebut diprediksi akan terus meningkat sejalan dengan berbagai penerapan inovatif yang mendukung dari iklim dunia usaha seperti penerapan aplikasi perizinan secara online. Investasi berskala nasional juga mulai nampak tumbuh, hal ini terbukti dengan terdapat 20 proyek berskala nasional penanaman modal asing (PMA) dengan investasi Rp1,6 triliun. Lalu ada empat proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp77,8 miliar.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Aceh perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya Undang-Undang tentang otonomi daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang ada selama ini, selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan yang baru, baik dari sektor pajak maupun perusahaan daerah. Kecilnya realisasi sumber-sumber PAD dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari PDRB, mengidentifikasikan bahwa daerah belum mampu mengoptimalisasikan kontribusi sumber-sumber pendapatannya terhadap PAD.

Persoalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah keterbatasan daerah dalam usaha menggali pendapatan asli daerahnya. Hal ini terlihat dari belum terinvetarisir secara baik sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan infrastruktur yang menunjang

penggalian dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Perekonomian disuatu daerah itu baik apabila upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah tinggi, dan sebaliknya akan lemah apabila upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah itu rendah.

Ahmad (1990) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto dan pertumbuhan sektor industri serta perhubungan. Jadi bila suatu daerah memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) didaerah tersebut juga tinggi.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang Sah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh dan bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Kota Banda Aceh?

Berkaitan dengan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang Sah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh dan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) di Kota Banda Aceh.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis yaitu metode deskripif, meliputi penyajian dan penyusunan data yang ada kedalam tabel-tabel sebagai bahan informasi untuk analisis, khususnya kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Kota Banda Aceh dan metode kuantitatif, yaitu data hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan model analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik dan kantor-kantor lainnya. Disamping itu data dikumpulkan juga melalui studi kepustakaan berupa literatur, jurnal, tulisan ilmiah, dan internet yang ada hubungan dengan penelitian ini.

a. Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Munir, Djuanda, Tangkilisan, 2002: 27).

Untuk Mengukur kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$KPD = \frac{PD_t}{\mathrm{PAD_t}} \times 100\% \quad (1)$$

Dimana:

KPD = Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

PD_t = Pajak Daerah tahun ke t

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun ke t

Untuk mengukur kontribusi retribusi Daerah terhadap PAD persamaannya adalah sebagai berikut:

$$KRD = \frac{RD_t}{\mathrm{PAD_t}} \times 100\% \quad (2)$$

Dimana:

KRD = Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

RD_t = Retribusi Daerah tahun ke t

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun ke t

Untuk mengukur kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD persamaannya adalah sebagai berikut:

$$KLPADS = \frac{LPADS_t}{PAD_t} x100\% \quad (3)$$

Dimana:

KLPADS = Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

$LPADS_t$ = lain-lain PAD yang sah tahun ke t

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun ke t

b. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi atas ketergantungan suatu variabel yaitu variabel yang tergantung pada variabel lai yang disebut dengan variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi dengan meramalkan nilai populasi berdasarkan nilai tertentu dari variabel yang diketahui (Gujarati, 1996:13-14).

Secara matematis keterkaitan antara variabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan formula menurut persamaan regresi linear berganda dan di transformasikan dalam bentuk logaritma dengan menggunakan kuadrat terkecil dengan formulasi sebagai berikut : (Algifari, 2000:65)

$$Y = f(X1,X2,X3)$$

$$PDRB = \alpha + \beta 1\ X1 + \beta 2\ X2 + \beta 3\ X3 + \mu i \quad \text{.....} \quad (4)$$

Kemudian persamaan diatas di tansformasikan kedalam bentuk Logaritma natural menjadi :

$$LnPDRB = \alpha + ß1Ln\ PD + ß2Ln\ RD + ß3Ln\ LPADS + \mu i \quad \text{.....} \quad (5)$$

Dimana :

LnPDRB = Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi)

LnPD = Pajak Daerah

LnRD = Retribusi Daerah

LnLPADS = Lain-Lain PAD yang sah

ß1, ß2, ß3 = koefisien masing-masing variabel

α = konstanta

μi = Variabel Penggangu

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan digunakan statistik uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan (bersamaan) terhadap variabel terikat (Pertumbuhan Ekonomi), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila nilai F hitung > F tabel dapat diartikan secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Banda Aceh.
- Apabila nilai F hitung < F tabel dapat diartikan secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Banda Aceh.

Kemudian uji t digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel bebas secara parsial (individu) terhadap PDRB dengan ketentuan apabila nilai t hitung suatu variabel lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat keyakinan 95% dapat diartikan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Sebaliknya apabila nilai t hitung suatu variabel lebih kecil dari nilai t tabel dapat diartikan variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD menunjukkan sejauh mana daerah mampu memaksimalkan pungutan realisasi pajak daerah yang dikutip menjadi sumber penerimaan daerah. Semakin tinggi realisasi pajak daerah maka semakin tinggi pula kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagaimana diisajikan dalam Grafik 2 berikut ini:

Grafik 2. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

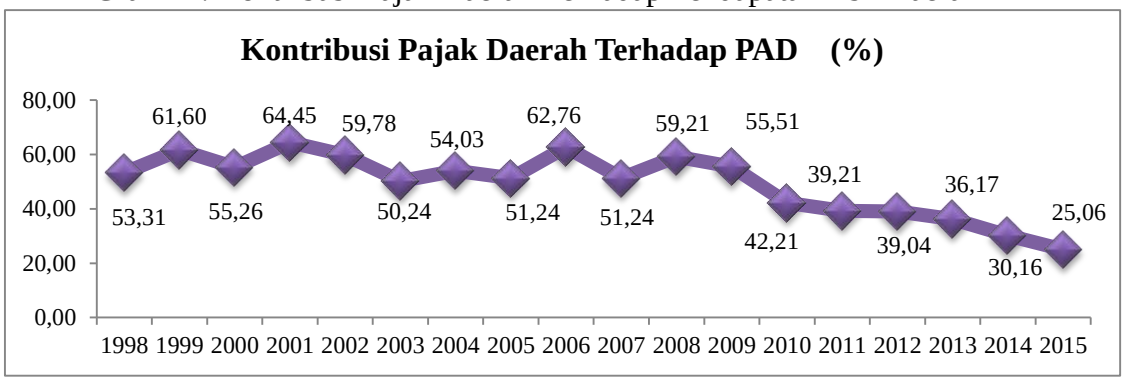

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, Pada tahun 1998 realisasi pajak daerah sebesar Rp1.898.447.131 dan sampai dengan tahun 2015 terus mengalami fluktuatif yang cukup berarti yaitu sebesar Rp51.534.672.190. Pada tahun 2001 pajak daerah memberikan kontribusi paling besar yang diteliti selama periode 1998-2015 yaitu sebesar 64,45 persen melebihi dari pada tahun 2006 setelah bencana tsunami yaitu sebesar 62,76 persen. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 25,06 persen masih dibawah kontribusi rata-rata pajak daerah pertahun dari total penerimaan PAD adalah sebesar 49,47 persen.

Pajak daerah pada tahun 2001 meliputi 7 (tujuh) jenis, dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2 Berikut ini:

Tabel 2. Jenis -Jenis Pajak Daerah Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2001

Jenis Pajak Daerah	**Realisasi Pajak Daerah (Rp. 000)**	**Kontribusi Terhadap PAD (%)**
1. Pajak Hotel dan Restoran	1.400.488.846	25,57
2. Pajak Hiburan	57.860.000	1,06
3. Pajak Reklame	43.518.000	0,79
4. Pajak Penerangan Jalan Umum	2.013.611.000	36,77
5. Pajak Parkir	0	0,00
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	0	0,00
7. Tunggakan Pajak	14.121.000	0,26

Sumber: DPKAD Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah)

Berdasarkan pajak daerah tahun 2001 yang memberikan kontribusi paling besar selama periode 1998-2015 yaitu sebesar 64,45 persen, dapat dilihat lagi kontribusi realisasi pajak daerah yang terbesar berada pada pajak penerangan jalan umum yaitu sebesar 36,77 persen dibandingkan dengan pajak hotel dan restoran sebesar 25,57 persen dan pajak hotel dan restoran sebesar 0,79 persen.

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang

diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari Grafik 3 berikut ini:

Grafik 3. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 1998 s/ d 2015 (dalam persen)

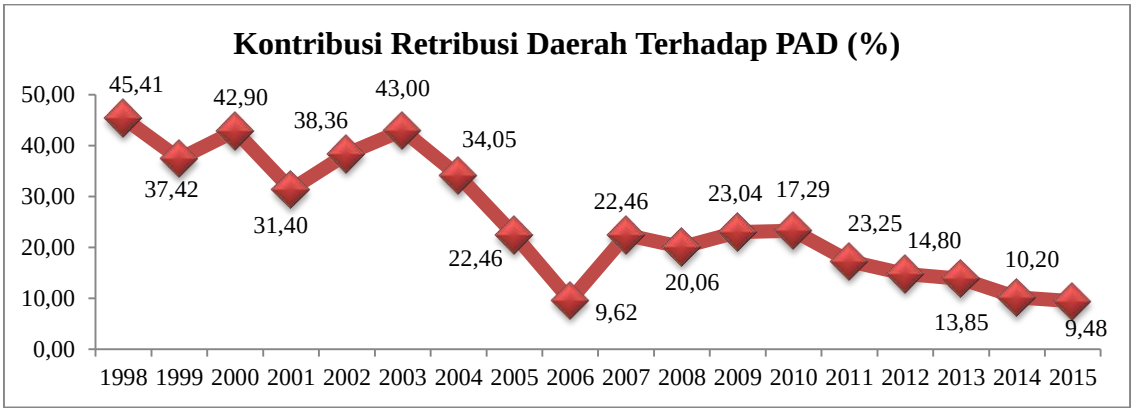

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, Pada tahun 1998 realisasi retribusi daerah sebesar Rp1.616.925.536 dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45,41 persen yang merupakan kontribusi retribusi daerah yang menempati urutan pertama selama periode 1998-2015, pada tahun anggaran 1999 realisasi retribusi daerah terus menurun sampai dengan tahun 2000 yaitu sebesar Rp984.474.622 dan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 42,90. Pada tahun 2006 kontribusinya sebesar 9,62 persen yaitu realisasi retribusi daerah hanya sebesar Rp1.659.864.500 dari total PAD sebesar Rp17.257.162.182. Sedangkan kontribusi retribusi daerah kota Banda Aceh terhadap PAD paling rendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 9,48 persen yaitu realisasi retribusi daerah hanya sebesar Rp19.494.630.782 dari total PAD sebesar Rp205.636.417.436.

Hal ini diakibatkan oleh belum optimalnya pungutan yang berasal dari retribusi, salah satunya adalah retribusi parkir yang memiliki potensi yang sangat besar untuk PAD. Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Muzakir Tulot, PAD kota Banda Aceh dari retribusi parkir pada tahun 2015 baru mencapai 59,9 persen atau senial Rp2,7 miliar. Angka tersebut masih jauh dibawah dari target pemerintah setempat yaitu Rp4,5 miliar. Badan jalan yang digunakan untuk parkir, uang nya tidak disetorkan langsung sebagai pendapatan dari retribusi parkir. Padahal terdapat 276 titik parkir yang merupakan penyumbang PAD retribusi parkir 59,9 persen setelah hasilnya dibagi dengan juru parkir yaitu 65 persen untuk juru parkir dan 35 persen buat pemerintah. Idealnya kita harus merubah sistem seperti yang berlaku di DKI Jakarta dimana juru parkir digaji sehingga PAD dari retribusi parkir juga bisa naik (Kanal Aceh, 2015)

Retribusi Daerah Kota Banda Aceh meliputi 15 jenis pada tahun 1998, dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis -Jenis Retribusi Daerah Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 1998

Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Daerah (Rp. 000)	Kontribusi Terhadap PAD (%)
1. Ret Pelayanan Kesehatan	93.415.000	2,62
2. Ret Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	189.835.000	5,33
3. Ret Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	114.197.000	3,21
4. Ret Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	296.053.000	8,31
5. Ret Pelayanan Pasar	255.747.536	7,18
6. Ret Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	9.389.000	0,26
7. Ret Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.050.000	0,03
8. Ret Pasar Grosir dan Pertokoan	116.101.000	3,26
9. Ret Jasa Usaha Terminal	305.432.000	8,58
10. Ret Usaha Penyedian dan/ atau Penyedot Kakus	42.000.000	1,18
11. Ret Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	39.819.000	1,12
12. Ret Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah	152.000	0,00
13. Ret Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	147.465.000	4,14
14. Ret Izin Gangguan/Keramaian	6.270.000	0,18
15. Ret. Lainnya	0	0,00

Sumber: DPKAD Pemerintah Kota Banda Aceh (diolah).

Berdasarkan retribusi daerah tahun 1998 yang memberikan kontribusi paling besar selama periode 1998-2015 yaitu sebesar 45,41 persen, dapat dilihat lagi kontribusi retribusi daerah yang menduduki urutan pertama berada pada Retribusi Jasa Usaha Terminal yaitu sebesar 8,58 persen dengan realisasi Rp305.432.000. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berada pada urutan kedua yaitu realisasi sebesar Rp296.053.000 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 8, 31 persen. Ret Pelayanan Kesehatan menempati urutan yang ke enam yaitu realisasi sebesar Rp93.415.000 (2,62 persen).

Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah menunjukkan sejauh mana daerah mampu memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dan pendapatan jasa giro, adalah sebagaimana diisajikan dalam Grafik 4 berikut ini:

Grafik 4. Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 1998 s/ d 2015 (dalam persen)

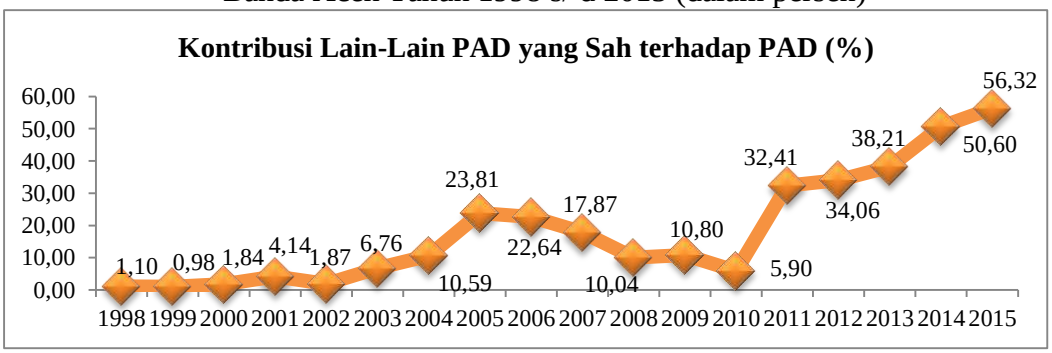

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (diolah)

Berdasarkan grafik 4 dapat dilihat pula kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah terhadap PAD terus mengalami peningkatan walaupun secara fluktuatif dan yang terbesar adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 56,32 persen dengan realisasi Rp115.814.569.008 dan melebihi dari target yaitu Rp106.626.860.484 , dan kontribusi yang terendah berada pada tahun 1999 yaitu hanya sebesar 0,98 persen dengan realisasi Rp35.088.019

Tabel 4. Jenis -Jenis Lain-Lain PAD yang Sah Serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2015

Jenis LPADS	Realisasi LPADS (Rp. 000)	Kontribusi Terhadap PAD (%)
1.Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0	0,00
2. Penerimaan Jasa Giro	206.899.986	0,10
3. Penerimaan Bunga Deposito	16.013.234.316	7,79
4. Pendapatan Denda Pajak	44.981.557	0,02
5. Pendapatan Denda Retribusi	470.400	0,00
6. Pendapatan dari Pengembalian	566.367.080	0,28
7. Lain-lain PAD yang sah	13.787.905.963	6,70
8. Pendapatan BLUD	85.194.709.705	41,43

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (diolah)

Berdasarkan lain-lain PAD yang sah tahun 2015 yang memberikan kontribusi paling besar selama periode 1998-2015 yaitu sebesar 56,32 persen, dapat dilihat lagi kontribusi lain-lain PAD yang sah yang menduduki urutan pertama berada pada pendapatan BLUD yaitu sebesar 41,43 persen dengan realisasi Rp85.194.709.705. Penerimaan bunga deposito berada pada urutan kedua yaitu realisasi sebesar Rp16.013.234.316 dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 7,79 persen.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasal 1, Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu sendiri adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kepala Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah (DPKAD) kota Banda Aceh Bapak Purnama Karya mengungkapkan bahwa Realisasi PAD kota Banda Aceh sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Pendapatan dari BLUD yang telah memenuhi target lain-lain PAD yang sah adalah ada tiga BLUD yaitu BLUD Dinas Perindutrian Perdagangan Koperasi dan UKM realisasinya sebesar 109 persen serta BLUD SMK yang realisasinya sebesar 105 persen. (Kantor Berita Radio Antero, 2015)

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam menganalisis Pengaruh Pajak, Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Kota Banda Aceh dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda dan ditransformasikan kedalam bentuk logaritma dengan metode Ordinary Least Squares (OLS) dan dengan menggunakan aplikasi Eviews 6.0 Hasil outputnya, dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Estimasi Model Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PD	-0.226923	0.464687	-0.488335	0.6329
RD	0.229231	0.352382	0.650518	0.5259
LPADS	0.370786	0.160571	2.309173	0.0367
C	8.973393	2.053633	4.369522	0.0006
R-squared	0.840388			
F-statistic	24.57093			
Prob(F-statistic)	0.000008			

Sumber: Data Penelitian Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil analisis regresi pengaruh pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

PDRB = 8.973393 - 0.226923 PD + 0.229231 RD + 0.370786 LPADS + µi

Kesimpulan dari persamaan diatas adalah:

1. Konstanta sebesar 8.973393 artinya bahwa jika PD, RD, dan LPADS bernilai nol, maka variabel PDRB (pertumbuhan ekonomi) adalah sebesar 89,73 miliar.
2. Koefisien regresi PD sebesar -0.226923 artinya bahwa jika tingkat Pajak Daerah (PD) meningkat sebesar 1 persen maka PDRB akan mengalami penurunan sebesar 2,27 persen.
3. Koefisien regresi RD sebesar 0.229231 artinya bahwa setiap kenaikan tingkat Retribusi Daerah (RD) sebesar 1 persen mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 2,29 persen.
4. Koefisien regresi LPADS sebesar 0.370786 artinya bahwa setiap kenaikan tingkat penerimaan lain-lain PAD yang sah (LPADS) sebesar 1 persen maka mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) naik lebih cepat sebesar 3,71 persen.

Pengujian Statistik

Jika R-squared (R^2) statistik mengukur tingkat keberhasilan model yang digunakan dalam memprediksi pengaruh variabel independen. Besar R-squared adalah $0<R^2<1$, dimana semakin tinggi nilai R-squared maka semakin besar pula kemampuan model dalam menerangkan variasi perubahan variabel dependen akibat pengaruh variabel independen.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh nilai R-squared = 0.840388 hal ini berarti bahwa 84 persen PDRB secara bersama-sama mampu dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan sisanya sebesar 16 persen dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk menguji signikansi seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel F, diperoleh nilai F

tabel sebesar 3.287. Menurut kaidah pengujian, jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak (Santoso, 2010:116), hal ini sesuai dengan hasil pengujian yaitu 24.57093 > 3.287 yang berarti menolak Ho. Maka hipotesis menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Perkembangan Pajak, Retribusi dan lain-lain PAD yang Sah terhadap Perkembangan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) di Kota Banda Aceh.

Uji Signifikansi parameter individu (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh dari tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil regresi model menunjukkan dari ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel Pajak Daerah (PD), Retribusi Daerah (RD) tidak signifikan pengaruhnya terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) sedangkan Lain-Lain PAD yang Sah secara parsial signifikan pengaruhnya terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi (PDRB).

Hal ini dapat dilihat dari hasil output Eviews dapat dilihat nilai t hitung untuk Log lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 2.309173. Taraf signifikan (α) pada kasus ini dengan nilai α=5% diperoleh nilai t tabel sebesar 2,110. Hal ini memperlihatkan variabel Log lain-lain PAD yang sah memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (t hitung > t tabel), maka variabel lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel PDRB. Sedangkan variabel pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial tidak signifikan pengaruhnya terhadap PDRB. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung untuk pajak daerah (PD) sebesar -0.488335 dan retribusi daerah (RD) sebesar 0.650518 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 2,110.

Pengujian Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Analisis uji normalitas yang digunakan adalah analisis statistik yaitu menggunakan hasil hitung *Jaque-Bera Normality Test (JB-Test).*

Grafik 5. Uji Normalitas

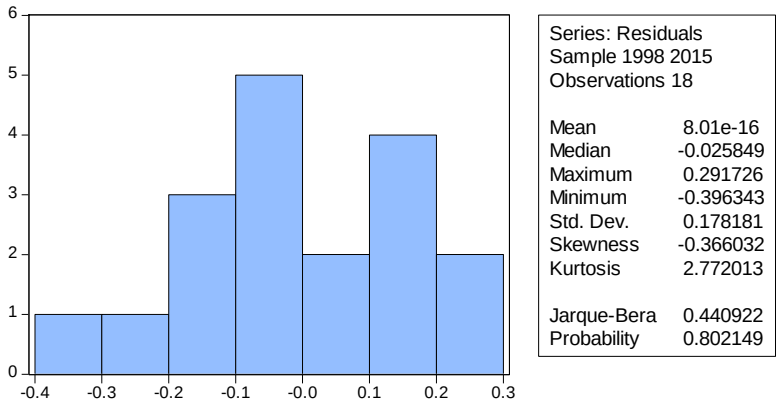

Hasil yang diperoleh menunjukan residual (error term) terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas *Jaque-Bera* sebesar 0,802149. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf nyata 5 persen.

b. Hasil Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model regresi. Maka untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam model digunakan pendekatan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.*

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.402111	Prob. F(2,12)	0.6776
Obs*R-squared	1.130564	Prob. Chi-Square(2)	0.5682
Durbin-Watson stat	1.967228		

Nilai probability Obs*R-squared sebesar 1.130564 lebih besar dari taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini (α = 5 persen). Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95 persen tidak terdapat gejala autokorelasi.

c. Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diketahui atau dilihat dari koefisien korelasi masing-masing varabel bebas. Jika koefisien korelasi di antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, maka terjadi multikolinearitas(Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011)

Uji multikolinearitas menggunakan *correlation matrix* . berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan Eviews 6.0 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Correlation Matrix

	DPDRB	DPD	DRD	DLPADS
DPDRB	1.000000	-0.391887	-0.303974	-0.208366
DPD	-0.391887	1.000000	0.627789	0.635097
DRD	-0.303974	0.627789	1.000000	0.406670
DLPADS	-0.208366	0.635097	0.406670	1.000000

Dari tabel dapat diketahui bahwa tidak ada masalah multikolinearitas dalam persamaan regresi linier berganda. Hal ini dikarenakan nilai matriks korelasi (correlation matrix) dari semua variabel adalah kurang dari 0,8.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana semua gangguan yang muncul dalam fungsi regresi populasi tidak memiliki varians yang sama (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011, hal. 36). Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada hasil berikut ini:

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.435962	Prob. F(9,8)	0.8810
Obs*R-squared	5.923171	Prob. Chi-Square(9)	0.7476
Scaled explained SS	3.174697	Prob. Chi-Square(9)	0.9570

Nilai probability Obs*R-squared sebesar 0.7476 lebih besar dari taraf nyata yang digunakan dalam penelitian ini (α = 5 persen). Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95 persen tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka kesimpulan untuk menjawab permasalahan seberapa besar kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah adalah pada tahun 2001, pajak daerah memberikan kontribusi paling besar yang diteliti selama periode 1998-2015 yaitu sebesar 64,45 persen (menempati urutan pertama berada pada pajak penerangan jalan umum yaitu sebesar 36,77 persen) melebihi dari pada tahun 2006 setelah bencana tsunami yaitu sebesar 62,76 persen. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 25,06 persen masih dibawah kontribusi rata-rata pajak daerah pertahun dari total penerimaan PAD adalah sebesar 49,47 persen. Untuk retribusi daerah pada tahun 1998 adalah realisasi retribusi daerah sebesar Rp1.616.925.536 dengan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 45,41 persen yang merupakan kontribusi retribusi daerah yang menempati urutan pertama selama periode 1998-2015. Sedangkan penerimaan lain-lain PAD yang sah tahun 2015 memberikan kontribusi paling besar selama periode 1998-2015 yaitu sebesar 56,32 persen, dan jenisnya yang menduduki urutan pertama berada pada pendapatan BLUD yaitu sebesar 41,43 persen dengan realisasi Rp85.194.709.705.

Hasil Regresi Linier Berganda juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan tingkat pajak daerah sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 2,27 persen. Namun setiap kenaikan penerimaan retribusi dan lain-lain PAD yang sah sebesar 1 persen akan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 2,29 persen dan 3,71 persen. Penerimaan lain-lain PAD yang sah berpengaruh secara signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap variabel PDRB. Sedangkan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara parsial tidak signifikan walaupun secara simultan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Banda Aceh yang dikur dengan PDRB.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin. 1995. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Mon Mata*, No. 20. Desember 1995, Banda Aceh: Penerbit Lembaga Unsyiah.

Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. 2011. Cara Cerdas Menguasai Eviews. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Algifari. 2000. Analisis Regresi Teori,Kasus dan Solusi.Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. 2013. Tinjauan Perekonomian Kota BAnda Aceh 2013. Banda Aceh.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh. 2015. Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh Tahun 2015. Banda Aceh.

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. 2016. Banda Aceh dalam Angka Tahun 2015

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Banda Aceh. 2010. Catatan Atas Laporan Keuangan**,** Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Banda Aceh.

Gujarati, D. 1996. Ekonometrika Dasar. Edisi VI. Jakarta : Erlangga.

Kanal Aceh. 30 October 2015. *PAD Banda Aceh dari Parkir Baru Mencapai 59,9 Persen*. Dipetik 1 April 2017, dari Kanal Aceh Berita Terpercaya: https://www.kanalaceh.com/2015/10/30/pad-banda-aceh-dari-parkir-baru-mencapai-599-persen/

Kantor Berita Radio Antero. (28 December 2015). *Realisasi PAD Banda Aceh Lampaui Target*. Dipetik 1 April 2017, dari Kantor Berita Radio Antero: http://portal.radioantero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5366:realisasi-pad-banda-aceh-lampaui-target&catid=46:ap

Munir, D., Djuanda, H. A & Tangkilisan, H. N. S. 2004. Kebijakan & Manajemen Keuangan Daerah**.** Yogyakarta: YPAPI.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Rizka, Islahuddin, & Nadirsyah. 2014. Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 3(3): 69-79.

Serambi Indonesia. 22 April 2015. Pertumbuhan Ekonomi Kecil di Banda Aceh Meningkat. Dipetik 1 April 2017, dari Serambi Indonesia: http://aceh.tribunnews.com/2015/04/22/pertumbuhan-ekonomi-kecil-di-banda-aceh-meningkat.

Suparmoko. 2001. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE.

Supranto, J. 1997. Pertimbangan Sektor Industri dan Dampaknya Pada Sektor Perbankkan, Bank dan Manajemen**,** Januari/Februari.

Todaro, MP. 1995. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

UU RI No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.